

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten Bungo Tahun 2016 – 2021

Zikral¹⁾, Ratih Kusumastuti²⁾, Gandy Wahyu Maulana Zulma³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi

¹⁾ zikralraidann@gmail.com ²⁾ ratihkusumastuti@gmail.com ³⁾ maulanagandi25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK, and Regional Original Revenue (PAD) on Bungo Regency local government capital expenditure allocation for 2016 - 2021. The subject of this study is the Bungo Regency government, and the object of this study is the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Local Original Revenue (PAD), and Capital Expenditure Allocation. The type of data collected is quantitative data sourced from Budget Realization Reports and documents. The method used in this study is the Multiple Linear Regression test. The results showed that the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Regional Original Revenue (PAD) together have a significant effect on the Capital Expenditure Allocation in Bungo Regency.

Keywords: *general allocation fund, special allocation fund, local original revenue.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal Pemerintah daerah Kabupaten Bungo tahun 2016-2021. Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Bungo, dan objek dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Belanja Modal. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Bungo.

Kata kunci: *Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Belanja Modal*

1. PENDAHULUAN

Setiap daerah perlu menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi.

Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Menurut Mamonto (2014) Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif supaya tidak terjadi pemborosan anggaran, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan public.

Perkembangan dan alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepala daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Menurut Halim, (2012) sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bungo tahun 2016-2021

Tahun	Belanja Modal	Belanja Operasional	Belanja Daerah	%
2016	110.596.439.443	835.967.590.823	1.089.477.250.696	10,15%
2017	156.057.609.902	819.682.363.992	1.190.415.102.747	13,10%
2018	203.211.813.790	880.468.350.968	1.300.741.604.588	15,62%
2019	234.629.991.486	874.803.516.099	1.386.881.390.096	16,91%
2020	153.987.416.404	863.224.250.611	1.294.680.573.588	11,89%
2021	103.295.154.352	837.858.676.772	1.155.170.164.478	8,94%

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2023)

Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya belanja modal di Kabupaten Bungo dibandingkan dengan belanja daerah yang mana belanja modal sendiri merupakan kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan belanja daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal lebih kecil dibanding belanja daerah, padahal Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Bungo cukup besar walaupun kenaikan dana tiap tahunnya kecil. Meskipun adanya belanja daerah yang cukup besar, Kabupaten Bungo pun tidak terlihat jelas adanya pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Bungo. Padahal, pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan anggaran belanja daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam 3 bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Bungo dapat terhambat sehingga tidak tercapainya salah satu misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Menurut hasil penelitian Yulian, (2019) dan Vanesha, (2019) dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan dalam bentuk belanja modal. Hal yang sama juga disetujui oleh Sugiardi, (2014), menyimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi, (2014), dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hal yang sama juga disampaikan oleh (Mulyati, 2019). Hal ini dikarenakan setiap tahunnya berubah dan cenderung mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sehingga pengaruhnya terhadap alokasi anggaran belanja modal cenderung sedikit.

Namun berbeda dengan penelitian dari Anika, (2021) yang menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dikarenakan nilai dana alokasi umum yang kecil sehingga tidak berkontribusi secara keseluruhan terhadap pengalokasian belanja modal. Alokasi belanja modal tidak dapat meningkat jika daerah memiliki dana alokasi umum yang kecil, hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum yang digunakan untuk belanja modal dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat hanya sedikit dan lebih diperuntukkan dalam membiayai pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai.

Objek penelitian dilakukan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini mengambil dari beberapa referensi tambahan jurnal yang berbeda, sehingga memungkinkan untuk melihat berbagai sudut pandang dari sisi peneliti lain tentang korelasi antara variabel independen dan variabel dependen seiring perkembangan penelitian dilakukan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengubah variabel silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikarenakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) kurang menarik untuk diteliti dengan keadaan anggaran yang relatif tidak terlalu tinggi. Kontribusi dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui apakah Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah terdistribusi secara wajar atau tidak dan apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang penting dalam belanja modal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kelompok PAD dipisahkan menjadi :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Bagian Laba Usaha Daerah
- Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah

2. Dana perimbangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun kelompok Dana Perimbangan :

- Bagi Hasil Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan Bukan Pajak (Proposisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi).
- Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Dana Perimbangan dari Provinsi ini khusus untuk kota/kabupaten.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti :

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan
- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga
- Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Meliputi :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Modal
6. Bunga
7. Subsidi
8. Hibah
9. Bantuan sosial
10. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
11. Belanja Tidak Terduga

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Meliputi :

1. Penerimaan
2. Pengeluaran

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa: "Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Menurut (Anggoro, 2017) Dana alokasi umum adalah pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah, sebab tidak semua mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal balance*). Dana

Alokasi Umum (DAU) sebagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping untuk mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (*equalization*) kemampuan keuangan pemerintah daerah.

2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah : “Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan utusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Menurut Anggoro, (2017) Dana alokasi khusus adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2.6 Belanja Modal

Menurut Halim, (2012) tentang pengertian Belanja Modal, yaitu : “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal Dikategorikan dalam lima kategori utama :

- a) Belanja Modal Tanah
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Belanja Modal Fisik Lainnya

3. METODOLOGI

3.1 Objek Penelitian

Menurut (Sunnyoto, 2016) Objek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus alokasi Belanja Modal di Kabupaten Bungo

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 sampai dengan 2021. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo (<https://bungokab.bps.go.id/>) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>).

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo

3.5 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Variabel-variabel ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti dimana data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan landasan teoritis yang diperoleh dari literature dan kemudian ditarik kesimpulan.

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang merupakan suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Variabel Bebas (X)
Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain.

Variabel independen dalam penelitian ini di antaranya :

- X1 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- X2 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2) Variabel Terikat (Y)

Variabel dependen (*dependent variabel*) merupakan variabel yang tergantung atau dapat dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan pengaruh variabel X yaitu Dana alokasi umum , Dana alokasi khusus dan Pendapatan asli daerah terhadap variabel Y yaitu Alokasi belanja modal. Berdasarkan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM SPSS 25, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada table berikut ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-704151748333.	95612773253.		-7.365	.018		
	DAU	.841	.110	2.320	7.655	.017	.71	1.4011
	DAK	2.770	.263	2.496	10.530	.009	.117	8.571
	PAD	-1.178	.226	-.771	-5.215	.035	.299	3.340

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -0.7041 + 0,841 X1 + 0,2770 X2 - 1,178 X3 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dari persamaan regresi (1) dimana Alokasi belanja modal , nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -0,7041. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen yang terdiri dari Dana alokasi umum , dana alokasi khusus dan Pendapatan asli daerah = 0, maka Alokasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 0.7041.

b. Koefisien regresi variabel Dana alokasi umum (X1) adalah sebesar 0,841 artinya jika variabel Dana alokasi umum (X1) naik sebesar satu satuan maka Alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 0,841.

c. Koefisien regresi variabel Dana alokasi khusus (X2) adalah sebesar 0,2770 artinya jika variabel Dana alokasi khusus (X2) naik sebesar satu satuan maka Alokasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 0,2770

d. Koefisien regresi variabel Pendapatan asli daerah (X3) adalah sebesar -1,178. artinya jika variabel Pendapatan asli daerah (X3) naik sebesar satu satuan maka Alokasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 1,178.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1297083064098115400 0000	3	432361021366038 5000000	50.196	.020 ^b

Residual	1722700423521800400 00	2	861350211760900 20000		
Total	1314310068333333600 0000	5			
a. Dependent Variable: BM					
b. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU					

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel, diketahui nilai F hitung dimana alokasi belanja modal sebesar 50,196, F tabel (dengan tingkat kepercayaan α sebesar 0,05 derajat bebas regresi sebesar 3 dan derajat residualnya 2) adalah sebesar 19,16, karena F hitung lebih besar dari F tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, dengan tingkat signifikan sebesar 0,02

lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana alokasi umum (X₁), Dana alokasi khusus (X₂), dan Pendapatan asli daerah (X₃) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Alokasi belanja modal (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-704151748333.	95612773253.		-7.365	.018		
	DAU	.841	.110	2.320	7.655	.017	.71	1.4011
	DAK	2.770	.263	2.496	10.530	.009	.117	8.571
	PAD	-1.178	.226	-.771	-5.215	.035	.299	3.340
a. Dependent Variable: BM								

Berdasarkan tabel uji t diatas, dapat diketahui bahwa :

a. Pengujian variabel Dana alokasi umum (X₁)

Pada tabel di atas, diperoleh nilai t hitung = 7,655 > t tabel = 2,35, dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,017 < 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana alokasi umum (X₁) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi belanja modal (Y)

b. Pengujian variabel Dana alokasi khusus (X₂)

Pada tabel di atas, diperoleh nilai t hitung = 10,530 > t tabel = 2,35, serta nilai signifikansi 0,009 < 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana alokasi khusus (X₂) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi belanja modal (Y).

c. Pengujian variabel Pendapatan asli daerah

(X₃)

Pada tabel di atas, diperoleh nilai t hitung = 5,215 > t tabel = 2,35, serta nilai signifikansi 0,035 < 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan asli daerah (X₃) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi belanja modal (Y)

4.2 Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Variabel Dana alokasi umum (X₁), Dana alokasi khusus (X₂), dan Pendapatan asli daerah (X₃) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Alokasi belanja modal (Y) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka akan membuat belanja modal pemerintah semakin efektif dalam produktivitas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan prasarana terhadap masyarakat. Dana Alokasi Umum juga dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pemerintah

daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin:2010). Untuk meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen Dana Alokasi Khusus (Dana Alokasi Khusus Pajak atau Dana Alokasi Khusus Sumber Daya Alam) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan yang dimana akan menjadi suatu bukti kemandirian daerah dalam meningkatkan belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai t hitung = 7,655 > t tabel = 2,35, dengan tingkat signifikansi t sebesar $0,017 < 0,05$ (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana alokasi umum (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi belanja modal (Y)

Dana alokasi umum merupakan suatu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dari APBN yang ditujukan untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya dikarenakan pendapatan asli daerah belum memumpuni kegiatan pembangunan daerahnya. Dana Alokasi Umum juga dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah diteliti oleh (Kuntari, 2019) serta (Isti, 2016) dimana keduanya mengungkapkan variabel Dana Alokasi Umum berdampak positif pada belanja modal. Namun penelitian ini berbeda (Setiyani, 2015) yang menyatakan variabel Dana Alokasi Umum tidak berdampak secara signifikan pada variabel belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis,, diperoleh nilai t hitung = 10,530 > t tabel = 2,35, serta nilai signifikan $0,009 > 0,05$ (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Dana alokasi khusus (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi belanja modal (Y).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana alokasi khusus yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berupa dana transfer dari pusat menuntut daerah membangun

dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana alokasi khusus untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Dana alokasi khusus diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti (Isti, 2016) dan (Susilowati & Rahmadewi, 2017) dimana dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh signifikan serta positif pada belanja modal. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fernandi & Nur, 2016) dimana mereka mengungkapkan dimana variabel dana alokasi khusus tidak berdampak secara positif terhadap belanja modal hal ini disebabkan pemerintah daerah tidak tergantung dengan dana alokasi khusus melainkan dengan dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) yang dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan aset baik itu aset yang jenisnya tetap ataupun aset dengan bentuk atau jenis yang lain yang akan memberikan dampak ataupun manfaat secara nyata.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai t hitung = 5,215 > t tabel = 2,35, serta nilai signifikan $0,035 < 0,05$ (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan asli daerah (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Alokasi belanja modal (Y)

Ketergantungan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah masih tinggi serta perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemda kota/kabupaten di Jawa Tengah masih mengandalkan dana sumber pendapatan transfer dari pusat untuk membiayai belanja modal. Tentunya pemerintah pusat sangat berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah masing masing. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah diujikan oleh (Muda & Azura, 2018), (Isti, 2016), yang mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

Hasil penelitian lainnya, Rahmawati (2010) yang menemukan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap

belanja langsung. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang di peroleh dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. pendapatan asli daerah juga merupakan sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika pendapatan asli daerah meningkat dana yang di miliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel bebas yaitu dana alokasi umum (X1), dana alokasi khusus (X2), dan pendapatan asli daerah (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat alokasi belanja modal (Y). Berdasarkan hasil penelitian ini, Pihak Pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan dapat merancang kebijakan yang terkait dengan temuan penelitian ini mengenai dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja modal.

5.2. Saran

Penelitian ini hanya terbatas menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi alokasi belanja modal seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat memprediksi alokasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. (2017) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Badan Pusat Statistik (2023) *Jambi Dalam Angka*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) *Dana Alokasi*, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
- Fadilah, H. and Helmayunita, N. (2020) *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Fitriana, N., & S. (2018) 'Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 5 No 5.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halmawati & Sari, B.I. (2020) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 3. No 1.
- Heliyanto Firnandi dan Handayani Nur (2016) 'Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, No 3.
- Henri Gerungan, D.P.E.S.V.I. (2017) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, Vol 8, No 1.
- Melda, H. and Syofyan, E. (2020) *Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat*, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Online. Available at: <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/24>.
- Mulyati, S. (2019) 'Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Retribusi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal', *Jurnal Akuntansi*, Vol. 13, No. 1.
- Nordiawan, D. dan H. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, Anika Syahdila. Muchtolifah. Dan Sishadiyati (2021) 'Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal', *Jambura Economic Education Journal*, Volume 3 No 2.
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini, Supadmi, N.L. (2014) 'Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* [Preprint].
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugotro, W. (2018) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal', *Jurnal Akuntansi* [Preprint].
- Sunyoto, D. (2016) *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Rafika Aditama.
- Vanessa, V. (2019) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana

- Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal', *Jurnal Akuntansi*, Vol. 14, No. 1.
- Yosea Eka Pradana, N.H. (2017) 'Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 6, Nomor 3.
- Yulian (2019) 'Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten Cilacap', *Jurnal Akuntansi*, Vol. 22, No. 3.
- Yuliantoni, S. and Indra Arza, F. (2021) *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019*, *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Zahari, M. (2018) 'Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal', *Jurnal Akuntansi*, Vol.18, No.3.